

**PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MP)
(Studi pada Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung)**

Siaga Basu Murbeng, Mochamad Saleh Soeaidy, Riyanto

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: siagabasu@yahoo.com

Abstract: *The Implementation of Rural Community Empowerment National Program (PNPM MP). Rural development plays important role because its synergy is inseparable from the local and national developments. Many development programs have been planned by the government for the rural. Almost all offices in the local government accommodate rural development into the work program. Therefore, the objective of the research is to discuss "The Implementation of PNPM MP". The type of research is descriptive with qualitative approach. Second is implementation stage involving fund delivery path for PNPM Mandiri Perdesaan. Based on result of data analysis, it is concluded that Bendungan Village is relatively good for the implementation of PNPM MP. Bendungan Village has implemented PNPM MP based on the steps and empowerment method in the general guide of PNPM. This guide explains about planning, implementation and preservation stages. However, some barriers impede the implementation of PNPM MP at Bendungan Village such as lack of understanding of PNPM MP.*

Keywords: *PNPM MP, rural community empowerment, nation building*

Abstrak: *Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM MP). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mendukung PNPM Mandiri yang wilayah kerja dan target sarannya adalah masyarakat pedesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (NPM MP) di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif; dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan PNPM MP Di Desa Bendungan Kecamatan Gondang. secara sistematis dibagi kedalam beberapa tahap di antaranya tahap perencanaan kemudian tahap pelaksanaan dan kemudian yang terakhir ialah tahap/proses pelestarian. Dalam pelaksanaannya PNPM MP di Desa Bendungan terdapat hambatan-hambatan di antaranya hambatan pada pemahaman terhadap PNPM MP.*

Kata kunci: *PNPM MP, pemberdayaan masyarakat, pembangunan nasional.*

Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, pembangunan nasional pada hendaknya diarahkan untuk membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang berarti menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia agar mampu melanjutkan pemba-

ngunan guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Hasil data BPS tahun 2006 menunjukan angka kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami angka kenaikan setiap periode mencapai 39,05 juta jiwa (17,75 %) meningkat 3,95 juta jiwa dari angka kemiskinan pada tahun 2005 sebesar 35,1 juta jiwa.

Dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan maka permasalahan sosial lainnya sebagai dampak kemiskinan juga bertambah. Seperti, masalah lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan,

meningkatnya angka kriminalitas, berkembangnya konflik-konflik sosial antar masyarakat, dan makin rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan hidup. Berkenaan dengan persoalan-persoalan di atas, maka upaya pemberdayaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan.

Maka dari itu pemerintah menca-
nangkan berbagi program-program dalam
upaya memberdayakan masyarakat salah
satunya adalah melalui Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM
–Mandiri) yang saat ini sedang gencar
dilaksanakan di berbagai daerah yang
dirasakan memerlukan program bantuan ini.
Sasaran yang perlu di berdayakan adalah
masyarakat yang strata sosialnya rendah
seperti, kaum buruh, nelayan, petani, orang
miskin di kota dan di desa.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan berkem-
bang karena adanya kebutuhan di negara-
negara yang sedang membangun untuk
mengembangkan lembaga-lembaga dan
pranata sosial, politik, dan ekonominya,
agar pembangunan dapat berhasil. Dari
sudut praktik, administrasi pembangunan
merangkum dua kegiatan besar dalam satu
kesatuan pengertian, yakni administrasi dan
pembangunan. Administrasi pembangunan
meliputi dua pengertian, yaitu pertama
tentang administrasi dan yang kedua
tentang pembangunan. Siagian (2003, h.4)
mengatakan bahwa administrasi adalah
keseluruhan proses pelaksanaan daripada
keputusan-keputusan yang telah diambil
dan pelaksanaan itu pada umumnya
dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk
mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

Sedangkan pembangunan didefinisikan
sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perubahan yang
berencana yang dilakukan secara sadar oleh
suatu bangsa, negara, dan pemerintah
menuju modernitas dalam rangka
pembinaan bangsa. Lebih lanjut Siagian
(2003), juga menyebutkan bahwa peme-
rintah memainkan peran yang dominan

dalam proses pembangunan nasional. Peran-
peran tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Peran Selaku Stabilisator.
- b) Peran Selaku Inovator.
- c) Peran Selaku Modernisator.
- d) Peran Selaku Pelopor.
- e) Peran Selaku Pelaksana Sendiri

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo
(1974, h.14) administrasi pembangunan
memiliki dua fungsi, yaitu perumusan
kebijakan pembangunan dan pelaksanaan
pembangunan secara efektif. Administrasi
bagi pembangunan lebih berorientasi untuk
mendukung usaha-usaha pembangunan
negara yang belum maju. Beberapa pende-
katan yang dilakukan dalam admi-nistrasi
bagi pembangunan adalah:

- a) Perencanaan
- b) Pengerahan Sumber Daya
- c) MenggerakkanPartisipasi Masyarakat
- d) Koordinasi
- e) Pengawasandan Evaluasi Pembangunan

Pembangunan secara etimologi berasal
dari kata bangun yang berarti sadar, siuman,
bangkit berdiri, dan juga berarti bentuk.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
pembangunan meliputi bentuk (*anatomis*),
kehidupan (*fisiologis*) dan perilaku
(*behavioral*).

Konsep pembangunan yang sudah
banyak dijelaskan oleh Agus Suryono dan
Trilaksono (2008, h.1) antara lain:

- a) Pertumbuhan (*growth*)
- b) Rekonstruksi (*reconstruction*)
- c) Modernisasi (*modernization*)
- d) Westernisasi (*westernization*)
- e) Perubahan sosial (*social change*)
- f) Pembebasan (*liberation*)
- g) Pembaruan (*innovation*)
- h) Pembangunan bangsa (*nation building*)
- i) Pembangunan-nasional (*national development*)
- j) Pembangunan (*development*) pengem-
bangan dan pembinaan.

Strategi pembangunan menurut Slamet
(198, h.110) diartikan sebagai keseluruhan
langkah-langkah pokok (kebijaksanaan-
kebijaksanaan) dan pelaksanaan yang melalui
perhitungan yang pasti digunakan untuk
mencapai tujuan atau mengatasi sesuatu
persoalan (*policy decision and execution*).
Dalam penyusunan strategi pembangunan
nasional suatu negara kita dapat memilih

beberapa pendekatan secara alternatif yang masih berorientasi kepada teori. Yaitu berupa *Growth theory*, *Rural Development Theory*, *Agro-First Theory*, *Basic Needs Theory* dan sebagainya.

Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materil maupun spiritual. Sumodiningrat (1999, h.172) mengungkapkan, peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsiderstakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki.

Pembangunan wilayah desa menurut Korten (1988, h.178) secara konseptual mengandung makna proses dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar (*equal*) yaitu pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan masyarakat desa sebagai bagian dari pembangunan nasional tentu saja mempunyai tujuan yang tidak terlepas dari pembangunan secara keseluruhan. Karena kondisi pedesaan mempunyai spesifikasi tertentu baik dalam bidang sosial maupun ekonomi maka tujuan pembangunan di pedesaan lebih sering ditekankan pada bidang ekonomi sebab kondisi ekonomi inilah yang pada

umumnya sangat memprihatinkan. Oleh sebab itulah tujuan pembangunan desa harus lebih diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Menurut Kartasasmita (1996, h.144) bahwa keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Disamping itu keberdayaan masyarakat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri sebagai faktor penentunya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan alat penting dan strategis untuk memperbaiki, memperbaharui, dan meningkatkan kinerja organisasi baik organisasi yang bergerak dalam kegiatan pemerintahan maupun organisasi yang bergerak dalam kegiatan dunia usaha. Pemberdayaan berasal dari bahasa inggris *empowerment*, yang secara harfiah bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (*disadvantaged*).

Dalam bukunya, *Pembangunan sosial dan Pemberdayaan: Teori, Kebijakan dan Penerapan*, Ginanjar Kartasasmita (1997), menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan, dan berkelanjutan.

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagaiupaya mencari alternatif

terhadap konsep-konsep partum-buhan di masa yang lalu.

Secara bertingkat keberdayaan masyarakat menurut Huraerah (2008, h.90) dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Tingkat keberdayaan pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*).
- b. Tingkat keberdayaan kedua adalah penguasaan dan akses terhadap berbagai sistem dan sumber yang diperlukan.
- c. Tingkat keberdayaan ketiga adalah dimilikinya kesadaran penuh akan berbagai potensi, kekuatan dan kelemahan diri dan lingkungannya.
- d. Tingkat keberdayaan keempat adalah kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan yang lebih luas.
- e. Tingkat keberdayaan kelima adalah kemampuan untuk mengendalikan diri dan lingkungannya. Tingkatan kelima ini dapat dilihat dari keikutsertaan dan dinamika masyarakat dalam mengevaluasi dan mengendalikan berbagai program dan kebijakan institusi dan pemerintahan.

Randy R Wrihatniko & R Nugroho Dwodjowinto (2007), mengungkapkan bahwa sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya.

Pada tahap ini masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Di upayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki kete-

rampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Pranarka & Vidhyandika (1996), menjelaskan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.

Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)

Pada dasarnya penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sumberdaya manusia pemberdayaan dimulai dengan membantu penduduk miskin agar makin sadar, percaya diri dan menghargai potensi yang dimilikinya. Tahap berikutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penduduk miskin serta menjamin bahwa kebutuhan hidup standar mereka dapat tercapai yang di antaranya mencakup bagaimana menyediakan kesempatan kepada mereka untuk meningkatkan pendapatan.

Adapun beberapa program yang dijalankan pemerintah adalah

- a. Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K)
- b. Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT)
- c. Inpres Desa Tertinggal (IDT)
- d. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

- e. Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)
- f. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007.

PNPM MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembanaan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimultan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkannya ke sejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Masyarakat yang mandiri tidak mungkin diwujudkan secara instan, melainkan melalui serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di rencanakan, dilaksanakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sendiri. Melalui kegiatan yang dilakukan dari untuk dan oleh masyarakat diharapkan upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif. Adapun sasaran dari PNPM MP ini adalah:

1. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan
2. Kelembagaan masyarakat di perdesaan
3. Kelembagaan pemerintahan lokal

Dana PNPM MP yang digunakan untuk membiayai program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) swadaya masyarakat dan partisipasi dunia usaha. Alokasi dana berdasarkan keberadaan desa tertinggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka alokasi besarnya dana berdasarkan jumlah desa yang tertinggal yang ada di kecamatan tersebut. Data desa

tertinggal merujuk pada data yang telah ditetapkan oleh kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).

Alokasi dana berdasar rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk di kecamatan. Untuk kecamatan yang tidak mempunyai desa tertinggal, yang telah ditentukan pemerintah, dialokasikan dengan menggunakan rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk dalam kecamatan.

tabel1. jumlah desa tertinggal dan besar alokasi dana

Jumlah desa tertinggal	Alokasi dana
<3	1000.000.000
4	1250.000.000
5	1500.000.000
6	1500.000.000
7	1750.000.000
8	2000.000.000
9	2250.000.000
10	2500.000.000
11	2750.000.000
>12	3000.000.000

Mekanisme Penyaluran Dana

Adapun proses penyaluran dana PNPM adalah sebagai berikut :

- a) Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan
- b) Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan.
- c) Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN.
- d) Besaran dana dari APBD disalurkan ke masyarakat harus utuh tidak termasuk pajak, retribusi, atau biaya lainnya.

Metode penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan agar peneliti bisa menggambarkan fenomena dan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Perdesaan (PNPMP) yang dilaksanakan di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini meliputi, Kantor Desa Bendungan Kecamatan Gondang (Kepala desa). Warga penerima program PNPMP Mandiri Perdesaan, TPK, FK, dan KPMD, UPK. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder.

Adapun sumber data primer dalam kegiatan penelitian ini antara lain sebagai berikut: Kepala Desa Bendungan, Tim TPK, UPK dan Kader Pemberdayaan, dan warga sekitar yang terkena Program PNPMP, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, laporan, majalah, surat kabar dan naskah hasil penelitian serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian.

Pembahasan

Desa Bendungan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Wilayah Desa Bendungan Kecamatan Gondang mempunyai jarak dari ibu kota kecamatan 1,5 km. Desa Bendungan Kecamatan Gondang merupakan salah satu desa yang mendapat bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM MP). PNPMP Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan sasaran utama adalah Rumah Tangga Miskin (RTM). Pada dasarnya Program PNPMP MP ini adalah proses pemberdayaan kepada masyarakat desa khususnya masyarakat Desa Bendungan

Bagaimana proses pemberdayaan yang harus dilakukan oleh pemerintah pernah dijelaskan oleh Kartasasmita (1996), bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu, Pertama: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga

diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat memajukan dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Sejak tahun 2011 Desa Bendungan mendapat bantuan dari PNPMP MP, bantuan tersebut berupa bantuan dana untuk pembangunan fisik dan non fisik. Di Desa Bendungan program yang telah dijalankan selama setahun terakhir adalah program pembangunan infrastruktur dan program simpan pinjam perempuan (SPP) yang masih terus berlangsung.

Desa Bendungan mendapatkan bantuan dana PNPMP sebesar Rp 276.595.100 yang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk memperbaiki jalan desa serta pembuatan saluran gorong-gorong dan dipergunakan dalam kegiatan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Program-program pemberdayaan PNPMP di Desa Bendungan

1. Pembangunan infrastruktur

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Kepala desa Bendungan, serta masyarakat yang memperoleh bantuan program PNPMP MP bahwa pelaksanaan PNPMP MP di desa Bendungan sepenuhnya telah dilaksanakan oleh masyarakat desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan proses pelestarian.

Dimana sebelumnya telah dibentuk kader-kader anggota organisasi PNPMP MP yang kesemuanya berasal dari masyarakat yang dipilih secara demokratis. Hal ini sesuai dengan pedoman operasional PNPMP MP dan diawasi oleh pihak fasilitator baik dari kabupaten dan kecamatan serta seluruh masyarakat Desa Bendungan.

Adapun sasaran utama yang di prioritaskan adalah bersal dari rumah tangga miskin dan keluarga miskin. Hal ini bertujuan agar tujuan dari program PNPM MP ini benar-benar tepat sasaran sesuai dengan pedoman umum PNPM MP.

Dan hal ini supaya masyarakat miskin merasakan berdaya dan terangkat perekonomiannya dengan mengikuti kerja dalam pembangunan program PNPM ini dimana menurut Sumodiningrat (1999, h.172) peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Program-program yang telah dilaksanakan :

- a) Pembuatan gorong-gorong sebagai saluran pembuangan air yang dilakukan sepanjang Dusun Krajan dan Pajaran.
- b) Rabat beton jalan alternatif desa salah satunya adalah jalan alternatif Dusun Krajan dengan Dusun Patoman.

Program pembangunan infrastruktur meliputi rabat beton jalan alternatif desa salah satunya adalah jalan alternatif Dusun Krajan dengan Dusun Patoman sepanjang 1,5 km, yang mana dulu sebelum adanya program PNPM MP Desa Bendungan jalan alternatif yang ada di Dusun Patoman dan Krajan tersebut sungguh parah keadaannya, jalan yang rusak dan sulit dilewati oleh masyarakat apalagi pada waktu musim penghujan dikarenakan akan becek dan licin.

Tapi setelah adanya perabatan beton jalan tersebut memudahkan para petani masyarakat Dusun Karajan dan Patoman dalam melakukan aktivitasnya apalagi pada waktu musim panen tiba dimana dalam mengangkut hasil panen warga tidak takut lagi melewati jalan tersebut yang memang lebih cepat untuk pulang pergi dalam mengangkut hasil panennya.

Sehingga Program PNPM MP ini juga membantu meningkatkan efektifitas warga Desa Bendungan sehingga mampu meningkatkan hasil perekonomiannya. Hal ini sesuai sasaran pembangunan sebagaimana

yang digalang pemerintah yaitu dimana pemba-ngunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual.

2. Pembangunan Non Fisik

Di Desa Bendungan Kecamatan Gondang terdapat 3 (tiga) Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang didanai oleh PNPM Mandiri Pedesaan yaitu Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu; Mawar, Anggrek dan Rosela. Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mawar berada di Dusun Induk Desa, Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Anggrek berada di Dusun Krajan, sedangkan Kelompok Simpan Perempuan (SPP) berada di Dusun Patoman. Di dalam pertemuan MDPK sebelumnya usulan yang disampaikan perlu mempertimbangkan hasil penggalan gagasan yang telah dilakukan sebelumnya.

Tujuan dari adanya program SPP ini pada dasarnya adalah untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat Desa Bendungan khusus perempuan, karena dengan adanya kegiatan SPP ini mereka cukup mudah untuk mendapatkan modal sebagai usaha maupun untuk meningkatkan usahanya yang sudah ada.

Tabel.3. Laporan pertanggungjawaban musyawarah desa serah terima desa Bendungan tahun 2011

no	uraian	Sumber dana		jumlah
		PNPM	swadaya	
1	Kegiatan SPP 3 kelompok	75.770.000		75.770.000
2	Kegiatan rabat beton jalan	120.765.500	4.200.000	1249765.500
3	Pembuatan gorong-gorong	66.230.000		66.230.000
4	Oprasiona I UPK	5.531.800		5.531.800
5	Oprasiona I TPK	8.297.800		8.297.800
	Jumlah	276.595.100	4.200.000	280.795.800

Di dalam pelaksanaanya, program simpan pinjam perempuan ini menggunakan sistem tanggung renteng yang dimana apabila ada salah satu anggotanya yang tidak mampu untuk membayar pinjaman, maka

anggota yang lainnya harus menutup biaya yang telah dipinjam oleh anggota tersebut.

Hal ini sebenarnya bertujuan untuk melatih tanggung jawab dan kebersamaan antar anggota kelompok simpan pinjam. Akan tetapi dalam observasi penulis dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam ini banyak juga anggota yang tidak bertanggung jawab dimana setelah meminjam uang tidak mau mengembalikan dengan alasan yang bermacam-macam.

Penutup

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari penulis dapat disimpulkan bahwa proses yang dilakukan dalam tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi merupakan langkah-langkah pengelolaan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Pelaksanaan program PNPM-MP di Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung adalah sebagai program pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat miskin Desa Bendungan yang di beri wadah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP).

Sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Bendungan belajar untuk berorganisasi dan bekerja sama serta lebih berdaya dan berkemandirian sehingga mampu untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga PNPM MP di Desa Bendungan telah dirasa mampu untuk:

1. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
2. Membantu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Bendungan terhadap pembangunan desa.
4. Membantu mengurangi tingkat pengangguran masyarakat desa.
5. Membantu dan mengembangkan usaha masyarakat desa.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana desa.
7. Meningkatkan pengetahuan dan SDM masyarakat desa.

Pada kelembagaan desa:

- a) Meningkatkan fungsi pemerintahan desa menjadi lebih efektif
 - b) Meningkatkan peran dan fungsi organisasi lembaga desa.
 - c) Adanya pembatasan waktu pengerjaan program pembangunan, pembatasan waktu ini sebenarnya bertujuan agar masyarakat berdisiplin dan tepat waktu sehingga tidak mengganggu rencana program yang lain. Akan tetapi pembatasan waktu ini juga dirasakan menjadi beban bagi masyarakat yang mengerjakan karena masyarakat masih dalam tahap belajar.
 - d) Adanya keterlambatan pasokan bahan baku bangunan menjadikan pelaksanaan pengerjaan pembangunan tersendat.
8. Dalam kegiatan Simpan Pinjam Khusus perempuan (SPP) juga terdapat beberapa macam hambatan yaitu:
- a) Kurangnya koordinasi antara pengurus kelompok dengan anggota.
 - b) Pengurus kelompok banyak yang tidak kenal dengan anggota baik dari segi karakter maupun kemampuannya dalam membayar.
 - c) Pengurus kelompok tidak menyampaikan setoran dari anggota ke UPK.
 - d) Usaha yang dijalankan oleh pengurus maupun anggota mengalami masalah.
 - e) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan di Desa Bendungan sehingga banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program SPP.

Pemerintah Desa Bendungan dalam hal ini adalah Bapak Kepala Desa harus lebih mengoptimalkan peranan organisasi karangtaruna dan pemuda-pemuda Desa Bendungan agar berpartisipasi dalam struktur dan pelaksanaan kegiatan PNPM MP yang lebih didominasi oleh peranan orang tua. Sehingga para pemuda desa ini terberdayakan dan keluar potensi yang dimiliki dan mempunyai pengalaman berorganisasi lebih baik. Hal ini dikarenakan pemuda desa merupakan masa depan dan harapan bagi kemajuan Desa Bendungan. Untuk mencapai keberlanjutan kegiatan kelompok SPP diharapkan adanya kemauan kelompok untuk lebih mempedulikan prinsip-prinsip keorganisasian, mempunyai anggaran dasar rumah tangga, sangsi yang tegas pada anggota kelompok

yang tidak bertanggung jawab sehingga kelompok dapat berkembang dan lebih maju serta berke-lanjutan.

Dibutuhkan kemauan dan semangat dari seluruh masyarakat Desa Benungan untuk terus mendukung dan menjaga hasil-hasil dari pembangunan yang sudah dilaksanakan sebagai suatu milik bersama

yang kegunaanya untuk seluruh masyarakat Desa Bendungan. Oleh sebab itu dalam hal ini Bapak Kepala desa selaku pembina dan penanggung jawab pembangunan desa hendaknya memberikan arahan dan memotivasi para pemuda desa agar mau menjaga hasil dari pembangunan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasasmita, Ginandjar.(1996) **Pembangunan Untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)**. Jakarta, CIDESS.
- PranakadanVidhyandika. (1996) **Pemberdayaan (Empowerment)**. Jakarta: Centre of Strategic and International Studies (CSIS).
- Siagian, Sondang P. (2003) **Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1997) **Pembangunan Daerah dan Pembangunan Masyarakat**. Jakarta, Bina Rena Pariwisata
- Suryono, Agus & Trilaksono Nugroho. (2008) **Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan masyarakat di Era Otonomi Daerah**. Malang, Banyumedia Publishing.
- Slamet, M. (1980) **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan**. Malang, P3M Universitas Brawijaya.
- Tjokroamidjojo. B. (1974) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, LP3ES.